



**FENOMENA MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN GEUSYIK
DESA UJONG BAROH TAHUN 2019**

Muksalmina¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

✉ corresponding author: munaz@unimal.ac.id

Submitted: 28/05/2024	Accepted: 01/06/2024	Revision: 09/06/2024	Approved: 29/06/2024
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/3			

ABSTRACT

Selection of Geusyik is a significant event among the community, especially in rural areas. Bribery to obtain votes is not a new phenomenon in this process. Due to the public perception that this is merely a local Geusyik election, many individuals regard it as unimportant. Those who do not exercise their voting rights become targets for Geusyik candidates to secure votes. Candidates give money to these individuals to garner votes from the community, particularly from those who are reluctant to vote. This study observes the phenomenon of money politics within the community. The purpose of this research is to understand the reasons why people accept money from Geusyik candidates. The study employs a qualitative method with data collection using purposive sampling. The subjects of this research are the residents of Gampong Ujong Baroh who accepted bribes and initially did not want to participate in the election. The study uses Alfred Schutz's phenomenology theory as its framework. The results show that the interest of the community to come to the polling stations can be bought with money. This is due to the lack of knowledge about the Geusyik candidates, leading them to abstain from voting; without money or incentives, they would not go to vote. Those who accept money feel they will benefit from taking the money and using their voting rights, thereby unconsciously violating legal regulations.

Keyword: Money Politic; Election; Geusyik

ABSTRAK

Pemilihan Geusyik menjadi salah satu agenda besar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat perkampungan. Tindakan suap-menyuap untuk memperoleh suara bukanlah hal baru dalam agenda tersebut. Karena pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa ini hanya skala Geusyik, banyak individu yang menganggap hal ini kurang penting. Hak pilih yang tidak digunakan menjadi sasaran calon Geusyik untuk mendapatkan suara. Calon



Geusyik memberikan uang kepada mereka agar mendapatkan suara dari masyarakat, terutama individu yang tidak ingin mencoblos. Penelitian ini mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai politik uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat alasan masyarakat mengambil uang yang berasal dari calon Geusyik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian adalah masyarakat Gampong Ujong Baroh yang menerima suap serta tidak ingin ikut serta dalam pemilihan pada awalnya. Penelitian ini menggunakan kacamata teori Alfred Schutz tentang fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk datang ke TPS dapat dibeli dengan uang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang calon Geusyik sehingga mereka memilih untuk golput; jika tidak ada uang atau insentif untuk pergi, maka mereka tidak akan pergi. Masyarakat yang diberi uang merasa bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan jika mengambil uang tersebut dan menggunakan hak suara yang mereka miliki, dengan demikian mereka secara tidak sadar telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Politik Uang; Pemilihan; Geusyik

PENDAHULUAN

Pemilihan pemimpin di Indonesia, termasuk pemilihan Geusyik, memang merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Pemilihan ini tidak hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang harga diri dan kehormatan masyarakat. Kampanye yang persuasif dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara sangatlah krusial. Namun, fenomena politik uang atau money politik sering kali muncul dalam pemilihan, termasuk pada pemilihan Geusyik. Praktik ini, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada pasal yang berkaitan dengan perilaku korupsi. Meskipun demikian, praktik politik uang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang 'lumrah' oleh sebagian masyarakat, terutama saat musim pemilihan tiba, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memperkuat integritas pemilu di Indonesia.¹

¹Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>



Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemilihan, serta menguatkan peran lembaga pengawas pemilu untuk menegakkan hukum dan mengurangi praktik politik uang. Dengan demikian, pemilihan Geusyik dan pemilihan lainnya dapat lebih mencerminkan kehendak sejati dari masyarakat. Praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa atau Geusyik di Indonesia memang telah menjadi topik penelitian yang cukup banyak dibahas. Seperti yang Anda sebutkan, penelitian oleh Fathur Rozy dan kawan-kawan (2020) menunjukkan bahwa uang digunakan sebagai media promosi oleh calon Geusyik untuk mendapatkan suara dari masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa uang dapat mempengaruhi perhatian dan keputusan masyarakat dalam pemilihan.² Penelitian lain oleh Amanu (2009) juga mengindikasikan bahwa praktik politik uang digunakan untuk menarik warga, terutama dari segi ekonomi, dengan janji-janji yang diberikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Hal ini mencerminkan bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dan politik di tingkat desa.³

Menurut penelitian yang ada, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Geusyik, termasuk ketidaktahuan tentang visi dan misi calon, prioritas ekonomi yang lebih tinggi, dan sikap apatis terhadap pemilihan dan calon. Penelitian oleh Dewi Ratnasari (2016) bahkan menemukan bahwa praktik politik uang sangat berpengaruh di masyarakat desa dan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bebas dan adil, serta memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mengurangi praktik politik uang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan kepala desa mencerminkan kehendak sejati masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata.⁴

²Fathur Rozy, Pratama Aditya, Rachmad Febriansyah, Fandi Ahmad, Amarul Ilham, A. M. F. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Journal of Sociology Research and Education*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>

³Amanu, M. (2009). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri).

⁴Dewi Ratnasari, A. S. (2016). Hubungan Penerimaan Money Politic Dengan Tingkat Partisipasi Jatikalen Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 3(4), 1859–1869. Etikan, I.



Praktik politik uang dalam pemilihan Geusyik di Gampong Ujong Baroh pada tahun 2019 memang menunjukkan beberapa dinamika yang menarik. Seperti yang telah disebutkan, adanya empat kandidat, termasuk Geusyik yang sedang menjabat, menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan penurunan minat untuk memberikan suara. Situasi ini dimanfaatkan oleh calon-calon Geusyik untuk 'membeli suara' dengan memberikan uang kepada warga yang tidak berminat untuk memilih.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif yang Anda gunakan memang sangat cocok untuk mendalami fenomena sosial seperti politik uang dalam pemilihan Geusyik. Pendekatan deskriptif yang diambil memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan memahami kompleksitas perilaku manusia dan interaksi sosial yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau data kuantitatif. Teknik purposive sampling yang disebutkan memungkinkan peneliti untuk memilih subjek yang paling relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih fokus dan mendalam. Hal ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada konteks dan pengalaman subjek yang diteliti.⁶

Penggunaan teori fenomenologi Alfred Schutz dalam penelitian ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana individu memberikan makna pada tindakan mereka berdasarkan pengalaman hidup mereka. Ini membantu dalam mengidentifikasi dan membandingkan model tindakan sosial yang berbeda, serta memahami bagaimana makna dan relevansi sosial terbentuk dalam interaksi antar individu. Dengan menggabungkan wawancara mendalam dan observasi sebagai metode pengumpulan data primer, serta melengkapi dengan data sekunder dari literatur yang relevan, penelitian Anda akan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik uang di Gampong Ujong Baroh dan bagaimana hal ini mempengaruhi proses

(2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>

⁵Harianto, H., Rahardjo, M., & Baru, B.M. (2018). Politik Uang dan Konflik Horizontal dalam Pemilihan Kepala Desa, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).



demokrasi lokal.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Politik Uang Masyarakat

Penelitian ini menyoroti pandangan yang cukup umum di beberapa komunitas, di mana politik uang dianggap sebagai bagian dari tradisi pemilihan. Persepsi bahwa pemberian uang atau barang selama pemilihan adalah “normal” atau bahkan “menyenangkan” menunjukkan betapa dalamnya praktik ini telah terakar dalam beberapa aspek kehidupan sosial dan politik.

Menariknya, dalam penelitian ini menemukan bahwa politik uang tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai, tetapi juga meliputi distribusi sembako dan undangan untuk makan bersama, yang semuanya bertujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa calon Geusyik menggunakan berbagai cara untuk menarik dukungan, yang mencerminkan keinginan kuat mereka untuk memenangkan pemilihan. Pandangan bahwa penerimaan politik uang adalah hal yang menguntungkan secara ekonomi dan tidak memiliki dampak negatif menunjukkan tantangan dalam mengubah persepsi masyarakat tentang integritas pemilihan. Ini juga menyoroti pentingnya pendidikan pemilih dan reformasi pemilihan untuk memastikan bahwa pemilihan Geusyik mencerminkan kehendak sejati masyarakat, bukan hasil dari transaksi ekonomi.

Pemberian uang tanpa memandang usia menunjukkan bahwa praktik ini ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, yang dapat mempengaruhi demografi pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana politik uang dapat mempengaruhi partisipasi dalam pemilihan lokal dan menyoroti perlunya tindakan untuk mengatasi masalah ini.⁸

2. Kurangnya Minat Masyarakat pada Pemilihan

Hasil wawancara Anda mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Geusyik. Faktor-faktor tersebut meliputi:

⁷Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>

⁸Nuratika. (2017). Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan.



- a) Penyelenggaraan Pemilu pada Hari Kerja: Penjadwalan pemilihan pada hari kerja menyulitkan mereka yang bekerja untuk memberikan suara, karena harus mengambil cuti atau mengorbankan waktu kerja.
- b) Persepsi Skala Kecil: Masyarakat cenderung menganggap pemilihan Geusyik sebagai acara skala kecil yang tidak terlalu penting, sehingga mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan berdampak signifikan.
- c) Sifat Apati: Ada kecenderungan apatis di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pemilihan Geusyik tidak akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka.⁹

Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan aksesibel dalam penyelenggaraan pemilihan Geusyik, seperti menyediakan informasi yang lebih baik tentang calon, mengadakan pemilihan di luar jam kerja, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemilihan bagi komunitas.

3. Penerimaan Uang untuk Meningkatkan Partisipasi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan Geusyik terhambat oleh beberapa faktor, termasuk apatis masyarakat dan praktik politik uang yang telah menjadi norma. Meskipun dianggap negatif, politik uang tetap bertahan karena manfaat ekonomi langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan integritas pemilihan. Untuk mengatasi masalah ini, mungkin perlu pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya fokus pada reformasi pemilihan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang adil dan transparan. Edukasi pemilih, penguatan lembaga pengawas pemilu, dan peningkatan aksesibilitas pemilihan mungkin merupakan langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi praktik politik uang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.¹⁰

⁹Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 51–60.

¹⁰Rifa Nabilah, Stevany Afrizal, dan Febrian Alwan Bahrudin, Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum, *Publisitas: Journal of Social Science and Politics*, Vol. 8 No. 2, April 2022.



Dengan demikian, memberikan wawasan tentang bagaimana praktik politik uang diterima dan dipandang dalam masyarakat Gampong Ujong Baroh. Dari satu sisi, ada kesenangan yang dirasakan oleh masyarakat saat menerima uang dari calon Geusyik, yang dianggap sebagai bagian dari 'permainan' pemilihan. Di sisi lain, ada faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menerima uang tersebut. Masyarakat desa mungkin merasa 'sungkan' untuk menolak uang karena takut merusak hubungan sosial, sementara pendatang menerima uang sebagai kompensasi atas waktu yang mereka korbankan dari pekerjaan mereka. Ini menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh norma sosial dan harapan komunitas.

4. Peran Tim Sukses dalam Pemilihan Geusyik

Peran tim sukses dalam pemilihan Geusyik memang sangat krusial. Mereka tidak hanya membantu dalam kampanye dan memperkenalkan calon kepada masyarakat, tetapi juga berperan dalam strategi pemenangan, termasuk distribusi insentif kepada pemilih. Ini mencerminkan aspek praktis dari politik lokal di mana hubungan sosial dan pengaruh komunitas memiliki peran penting. Namun, penting untuk diingat bahwa praktik seperti pemberian uang atau insentif lainnya dalam konteks pemilihan dapat menimbulkan pertanyaan etis dan legal. Meskipun mungkin diterima dalam beberapa komunitas, praktik ini dapat mengaburkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Oleh karena itu, ada upaya yang terus-menerus dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan integritas calon, bukan berdasarkan insentif jangka pendek.

Dalam konteks yang lebih luas, reformasi pemilihan dan peningkatan kesadaran pemilih dapat membantu mengurangi ketergantungan pada tim sukses sebagai perantara dan mendorong partisipasi pemilih yang lebih berdasarkan informasi dan kesadaran. Ini adalah langkah penting menuju pemilihan yang lebih representatif dan pemerintahan yang lebih akuntabel. Ketika anggota masyarakat melihat tetangga mereka menerima uang dari tim sukses, mereka mungkin merasa terdorong untuk mengikuti contoh tersebut. Selain itu, reputasi dan hubungan sosial yang baik dalam komunitas dapat memudahkan tim sukses dalam memobilisasi dukungan untuk calon Geusyik. Koneksi keluarga dan kekerabatan juga berperan dalam memfasilitasi gerakan



tim sukses, karena adanya rasa kekeluargaan yang kuat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks sosial dan budaya lokal dalam upaya memperkuat proses demokrasi dan integritas pemilihan. Ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam praktik politik uang mungkin memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, mengaitkan praktik politik uang dengan fenomenologi Alfred Schutz menawarkan perspektif mendalam tentang perilaku pemilih dan dinamika pemilihan Geusiyik. Menurut Schutz, tindakan individu dipengaruhi oleh konteks sosial mereka dan makna yang mereka atributkan pada situasi tertentu. Dalam kasus pemilihan Geusiyik, pemicu tindakan, seperti penerimaan uang, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan-sebuah refleksi dari realitas sosial mereka.¹¹

Pemahaman ini dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk mengatasi politik uang dengan menargetkan faktor-faktor yang mendorong perilaku pemilih. Edukasi pemilih, peningkatan transparansi proses pemilihan, dan penguatan lembaga pengawas pemilu bisa menjadi langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan pemilihan yang lebih adil dan mewakili kehendak sejati masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik politik uang telah menjadi bagian dari tradisi pemilihan kepala desa (pilkades) dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku pemilih. Fenomena ini, yang dilihat sebagai sesuatu yang meriah dan diharapkan oleh sebagian masyarakat, menunjukkan bagaimana norma sosial dan harapan dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap politik uang.¹²

Dari perspektif fenomenologi Alfred Schutz, praktik politik uang mencerminkan makna yang dibentuk oleh pengalaman sosial masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tindakan individu seperti memilih untuk memberikan suara setelah menerima uang adalah hasil dari interaksi sosial dan pengaruh lingkungan. Pemahaman mendalam tentang fenomena ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam memerangi politik uang dan

¹¹Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>

¹²Rohmawati, T. (2013). Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *IPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*.



mempromosikan pemilihan yang lebih adil dan transparan. Upaya ini mungkin termasuk pendidikan pemilih, peningkatan kesadaran tentang pentingnya integritas pemilihan, dan penguatan lembaga pengawas pemilu.

Memahami fenomena politik uang dalam pemilihan Geusyik melalui lensa fenomenologi Alfred Schutz memang memberikan perspektif yang berbeda. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami makna yang diberikan masyarakat terhadap tindakan mereka, termasuk dalam konteks politik uang. Seperti yang Anda sebutkan, politik uang telah menjadi semacam 'lingkaran setan' yang sulit dipecahkan karena telah terintegrasi dalam struktur sosial dan budaya pemilihan lokal. Pemilihan Geusyik memang sering kali dianggap sebagai pesta demokrasi, namun praktik politik uang yang terlibat dapat mengaburkan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Calon Geusyik yang berusaha mendapatkan dukungan melalui tim sukses dan politik uang tidak hanya berjuang untuk posisi, tetapi juga untuk membawa nama dan kehormatan keluarga mereka.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang korupsi dan politik uang. Pendidikan semacam ini dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif dari praktik ini dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih etis dan bertanggung jawab dalam pemilihan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk datang ke TPS dapat dibeli dengan uang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang calon Geusyik sehingga mereka memilih untuk golput; jika tidak ada uang atau insentif untuk pergi, maka mereka tidak akan pergi. Masyarakat yang diberi uang merasa bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan jika mengambil uang tersebut dan menggunakan hak suara yang mereka miliki, dengan demikian mereka secara tidak sadar telah melanggar peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

Amanu, M. (2009). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)



- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 51–60.
- Dewi Ratnasari, A. S. (2016). Hubungan Penerimaan Money Politic Dengan Tingkat Partisipasi Jaticalen Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 3(4), 1859–1869.
- Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fathur Rozy, Pratama Aditya, Rachmad Febriansyah, Fandi Ahmad, Amarul Ilham, A. M. F. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Journal of Sociology Research and Education*, 7(1). <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Harianto, H., Rahardjo, M., & Baru, B.M. (2018). Politik Uang dan Konflik Horizontal dalam Pemilihan Kepala Desa, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
- Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>
- Nuratika. (2017). Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan.
- Meranti Tahun 2015. *JomFISIP*, 4(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/>
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>.
- Rifa Nabilah, Stevany Afrizal, dan Febrian Alwan Bahrudin, Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum, *Publisitas: Journal of Social Science and Politics*, Vol. 8 No. 2, April 2022.
- Rohmawati, T. (2013). Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *IPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*.
- Muksalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 764-773.